



PUSAT DATA DAN INFORMASI



LAPORAN KINERJA 2022



PUSAT DATA DAN INFORMASI



LAPORAN KINERJA 2022

PENGANTAR

Pusat Data dan Informasi memiliki empat target kinerja kegiatan sesuai mandat yang tertuang di dalam perjanjian kinerja tahun 2022, yaitu data dan informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat kepuasan layanan data dan sistem informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), jumlah pengunjung web Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Laporan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan cakupan dari hasil-hasil pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2022 serta penetapan kinerja para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bidang di Lingkup Pusat Data dan Informasi Tahun 2022.

Dengan kolaborasi melalui banyak pihak dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, Pusat Data dan Informasi telah berhasil melaksanakan dan menyelesaikan seluruh target kinerja yang ditetapkan dengan persentase capaian penyelesaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sejumlah 99,92%. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari inovasi yang dilakukan baik dari hal perencanaan penganggaran sampai dengan metode teknis kegiatan, melalui pendekatan HITS (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial)

Pusat Data dan Informasi berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak khususnya yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan, serta dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi maupun proses perencanaan yang akan datang sehingga dapat tersusun dengan baik dan berhasil guna.

Jakarta, 31 Desember 2022
Kepala Pusat Data dan Informasi,



Dr. Edi Sulisty H. Susetyo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19701206 200003 1 004



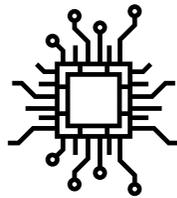
**"Berusahalah untuk tidak menjadi sukses, tapi
berusahalah untuk menjadi bernilai."**



DATA



INFORMASI



TEKNOLOGI



LAPORAN KINERJA 2022

Pusat Data dan Informasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pusat Data dan Informasi mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah menyumbangkan foto-foto untuk menghiasi Laporan Strategis ini :

Disusun oleh:

(diurutkan secara abjad)

Afifah Widodo Putri, Agung Wicaksana, Andry Januardy,
Deni Prasetyo, Lenny Juanita Sari, Phury Agathis, Syafira
Nur Hasanah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

ONE
Data
Information
Technology

Dokumen ini dapat diunduh melalui tautan:



DAFTAR ISI

- 01** Ringkasan Eksekutif
- 02** Ringkasan Capaian Kinerja
- 03** Pendahuluan
- 04** Perencanaan Kinerja
- 05** Akuntabilitas Kinerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Target kinerja kegiatan Pusat Data dan Informasi disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2022. Perjanjian kinerja dimaksud merupakan sebuah kontrak kesanggupan unit kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Inovasi dilakukan baik dari hal perencanaan penganggaran sampai dengan metode teknis kegiatan yang dilakukan, dengan pendekatan HITS (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial) yang di fokuskan empat indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 yaitu: Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Tingkat kepuasan layanan data dan Sistem Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/SPBE; Jumlah pengunjung Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Secara ringkas pencapaian dari indikator kegiatan penyelenggaraan data dan informasi KLHK dengan sasaran kegiatan meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi Kementerian, maka dijabarkan sebagai berikut : Satu, penyusunan dokumen data dan informasi sebanyak 3 dokumen dimana telah dapat disusun buku Statistik, buku Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022, dan buku Status Hutan dan Kehutanan 2022. Dua, target nilai indeks tingkat kepuasan layanan data dan sistem informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai 4 point tercapai 100%. Tiga, pencapaian target nilai SPBE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejumlah **2,62 point tercapai 100%**; Empat, jumlah pengunjung WEB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahun sejumlah 1.288.049 kunjungan tercapai 100%. Pada tahun 2022 Pusat Data dan Informasi sebagai pengelola infrastruktur jaringan telah menjamin ketersediaan *bandwidth* internet sebesar 1700 MBps untuk mendukung pekerjaan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disamping itu Pusdatin memiliki ruangan khusus untuk memfasilitasi penyimpanan server dengan kapasitas 23 Rak Server.

Selain kinerja di tahun 2022, dengan menerapkan kebijakan Money follows program memastikan anggaran dialokasikan berdasar pada kebermanfaatkan kegiatan sehingga serapan anggaran Pusat data dan Informasi mencapai 99,92%, bila dibandingkan antara capaian output kegiatan dengan besaran serapan anggaran maka Pusat Data dan Informasi melakukan efisiensi.

2022 RINGKASAN CAPAIAN KINERJA

Pusat Data dan Informasi

100% Capaian Kinerja

100% Realisasi Anggaran

100% Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

100% Data dan Informasi KLHK

100% Pengelolaan Website

100% Pengelolaan Infrastruktur Jaringan

100% Pengembangan Aplikasi

100% Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Sistem Informasi KLHK



I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/MENLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Data dan Informasi merupakan unit organisasi di bawah Menteri yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem dan teknologi informasi, serta sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pemerintah berbasis elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan administrasi pusat.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi diatas maka tantangan pusat data dan informasi adalah menyediakan layanan data data informasi yang dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan, layanan data dan informasi ke masyarakat, serta layanan teknologi informasi kepada unit-unit dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai bentuk akuntabilitas maka perlu disusun Laporan Kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai petanggungjawaban kinerja yang telah ditandatangani.

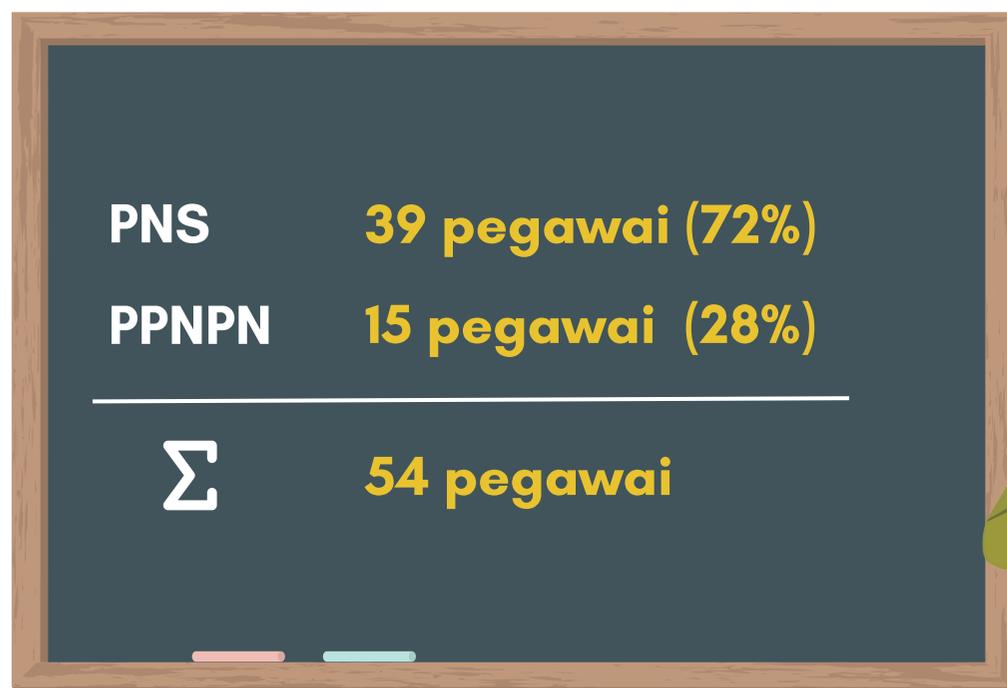
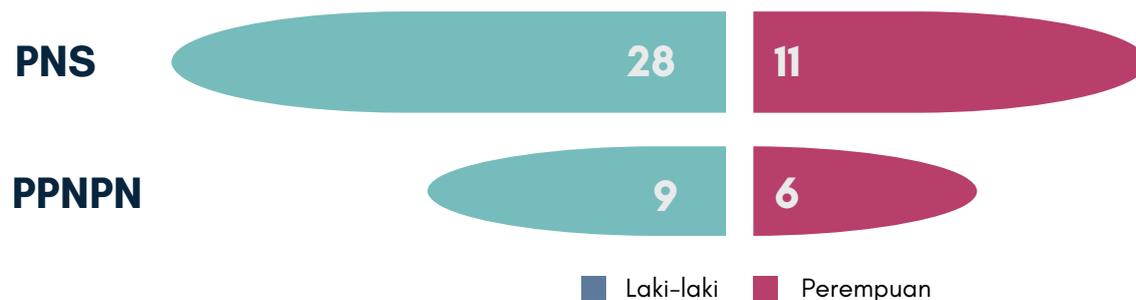
Dalam menjalankan tugasnya, struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi membawahi tiga bidang yaitu: Bidang Pengelolaan Data, Bidang Pengelolaan Informasi dan Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi yang didukung oleh Sub bidang teknis dan Subbagian tata usaha.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting Pusat Data dan Informasi. Pada pelaksanaannya, dalam menjalankan tugas-tugas yang dimiliki, Pusat Data dan Informasi ditunjang oleh keberadaan SDM yang memadai. Ketersediaan SDM yang profesional dan berintegritas yang ditunjukkan dengan aspek kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang handal dalam kalkulasi kuantitas dan kalkulasi yang ideal sesuai kebutuhan organisasi akan mampu menjadi faktor utama dalam mewujudkan pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan sebaran jenis kelamin pegawai di Pusat Data dan Informasi, baik pegawai yang berstatus PNS maupun PPNP didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Total pegawai laki-laki di Pusat Data dan Informasi sejumlah 37 pegawai atau sebesar 69% sedangkan pegawai perempuan sejumlah 17 pegawai atau sebesar 31%.

Pemetaan SDM yang tepat serta potensi SDM yang dimiliki merupakan awalan dalam mencapai keberhasilan kinerja di dalam organisasi. Total SDM Pusat Data dan Informasi keseluruhan yaitu 54 pegawai, yang terdiri dari 39 pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 15 pegawai berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP), serta diprediksi pada tahun 2023 hanya terdapat 2 pegawai yang memasuki masa purna.



II. PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, Pusat Data dan Informasi berkewajiban menyediakan layanan data informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan, layanan data dan informasi yang dapat diakses masyarakat, serta layanan teknologi informasi kepada unit-unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terdapat dua sasaran kegiatan Pusat Data dan Informasi yaitu termanfaatkannya informasi kualitas lingkungan hidup untuk pengukuran kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengambilan kebijakan dan tercapainya layanan data, informasi, dan infrastruktur sistem informasi LHK. Selanjutnya dari dua sasaran tersebut dijabarkan dalam empat indikator kinerja Pusat Data dan Informasi beserta target capaian kinerja tahun 2022.

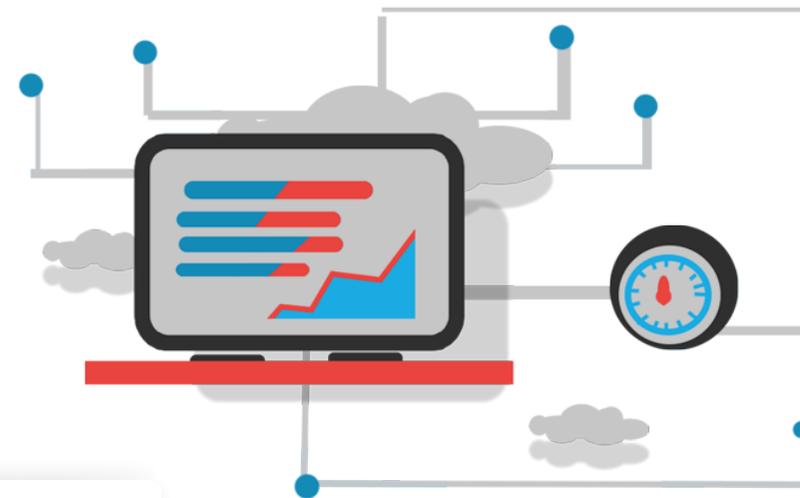
 **Nilai SPBE**

 **Jumlah Pengunjung web KLHK**

 **Data dan Informasi KLHK**

Statistik KLHK
SLHI
SOIFO

 **Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Informasi KLHK**



Terdapat dua sasaran kegiatan Pusat Data dan Informasi yaitu: 1). Termanfaatkannya informasi kualitas lingkungan hidup untuk pengukuran kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pengambilan kebijakan; 2). Tercapainya layanan data, informasi, dan infrastruktur sistem informasi LHK. Selanjutnya dari dua sasaran tersebut dijabarkan dalam 4 Indikator kinerja Pusat Data dan Informasi beserta target capaian kinerja tahun 2022. Alokasi anggaran untuk pencapaian target kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2022 sejumlah Rp. 20.262.184.000,-



III. AKUNTABILITAS KINERJA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

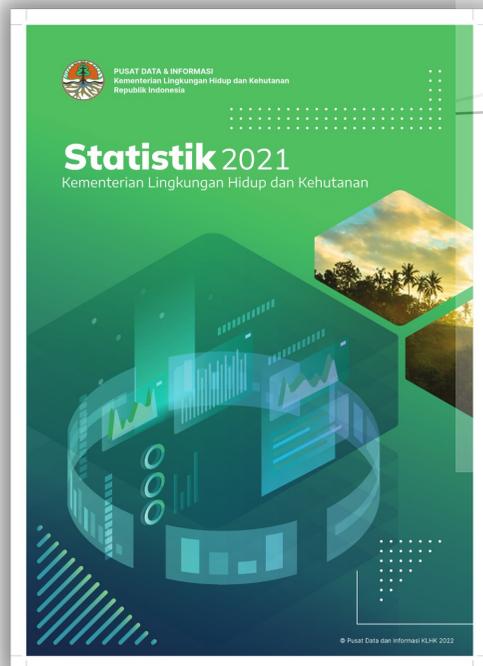
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Maka untuk mewujudkannya, Pusat Data dan Informasi KemenLHK melaporkan akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

A. Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

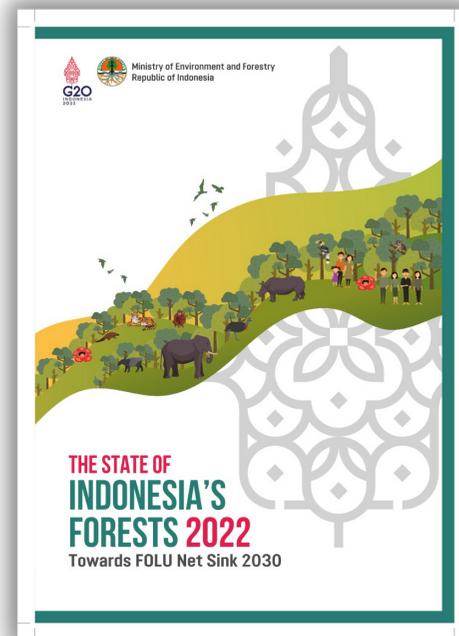
Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021



Mengacu pada Permen LHK No. 19/2018 tentang Penyelenggaraan Statistik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka sebagai salah satu bagian dari target kinerja di tahun 2021 Pusat Data dan Informasi setiap tahunnya Menyusun dokumen Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen tersebut berisikan kumpulan data-data statistik utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersumber dari dokumen statistik 13 Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Status Hutan 2022 dan SOIFo

Publikasi SOIFo atau Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2022 merupakan pembaruan dari Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2020. SOIFo 2022 menyoroti pencapaian dan kemajuan terbaru Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dalam mengelola hutan Indonesia secara lestari dan mengatasi dampak perubahan iklim global. Dokumen ini disusun oleh tim penulis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyajikan data dan informasi terkini mengenai pengelolaan hutan tropis Indonesia, dan memberikan gambaran kemajuan yang telah dicapai sampai saat ini.



SLHI (Status Lingkungan Hidup Indonesia) dan The State of Indonesia's Environment 2022

Dalam rangka menyediakan dokumentasi berupa data dan informasi tentang lingkungan hidup dalam satu tahun, yang selanjutnya dipakai untuk perencanaan, pengambilan keputusan, pendidikan dan peningkatan peran publik perlu disusun suatu laporan Status Lingkungan Hidup. Laporan Status Lingkungan Hidup (SLH) memberikan gambaran umum mengenai kondisi biogeofisik dan sosio-ekonomik serta bagaimana pengaruh aktivitas manusia terhadap kelestarian lingkungan hidup dan implikasinya terhadap perekonomian dan kesehatan manusia. Selain itu, laporan Status Lingkungan Hidup juga akan memberikan gambaran tentang hasil dari suatu upaya atau respon, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, terhadap perbaikan kondisi lingkungan hidup. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi "Earth Summit " tahun 1992 mengamanatkan agar setiap negara melaporkan status kondisi lingkungannya secara berkala.

Untuk memenuhi amanat tersebut dan memenuhi kewajiban UU No. 23 tahun 1997 pasal 10, huruf h, yaitu dalam rangka akuntabilitas publik perlu disusun Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia, dan sampai saat ini sudah lima Laporan yang diterbitkan yaitu SLHI mulai tahun 2002. Untuk SLHI 2018 publikasi laporan tersebut akan disampaikan dalam bentuk buku yang berbahasa Indonesia serta CD berbahasa Indonesia dan Inggris. Bentuk buku dan CD disediakan dalam jumlah terbatas hanya untuk dokumentasi KLHK. Pentingnya pelaporan Status Lingkungan Hidup Indonesia sebagai bagian dari akuntabilitas publik juga merupakan upaya dalam melaksanakan amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Laporan SLHI merupakan bagian dari proses besar yang ditujukan untuk mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan melalui penyediaan informasi yang akurat. Diharapkan kedepan dengan data dan komunikasi informasi yang lebih baik, laporan ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.



B. Kegiatan Data dan Informasi Lain Sesuai Tusi Pusat Data dan Informasi

1. Green Leadership Indonesia

Program Green Leadership Indonesia ini diinisiasi oleh Institut Hijau Indonesia, serta didukung oleh Walhi, KNTI dan HUMA. Program ini akan memfasilitasi anak muda sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki perspektif keadilan sosial dan lingkungan hidup dan keberpihakan kepada lingkungan hidup. Program ini ingin menjaring calon pemimpin yang berasal dari beragam latar belakang agar semua segmen dalam masyarakat memiliki calon pemimpin yang punya prespektif green dan keberpihakan nyata bagi penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Para peserta didik akan ditemani oleh para leaders, akademisi, praktisi, dan aktivis yang memiliki rekam jejak Panjang dalam bidang masing-masing.

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan pelatihan Green Leadership ini adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi tumbuhnya pemimpin-pemimpin baru yang memiliki perspektif hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Mengarusutamakan Perspektif hijau pada seluruh peserta yang berasal dari beragam sektor;
3. Terbentuk jejaring green leaders diberbagai level; dan
4. Berkembangnya inisiatif peserta dalam menguatkan gerakan keadilan sosial dan lingkungan hidup di tingkat lokal, nasional, dan internasional.



2. Penghargaan Nirwasita Tantra 2021

Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah yang diberikan kepada Pimpinan Daerah baik eksekutif maupun legislatif, yang berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan menuju green economy. Proses Penilaian Green Leadership adalah Penyusunan Dokumen Informasi Penilaian Kinerja Lingkungan Hidup Daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kota dan Kabupaten yang dikumpulkan pada tanggal 31 Agustus 2022 yang kemudian di nilai dengan tahapan sebagai berikut : penilaian kelengkapan tabel yang jumlahnya sebanyak 61 Tabel yang dilakukan oleh Pusdatin KLHK, kemudian Penilaian Analisis DPSIR yang dilaksanakan oleh Tim panelis Nirwasita Tantra, yang ditunjuk oleh Menteri LHK, dan Proses Penilaian Video pendek yang dikumpulkan oleh daerah serta verifikasi lapangan. Kategori penilaian nirwasita adalah yang terdiri dari Kategori Kepala Daerah yang meliputi kategori Propinsi, kategori kabupaten (Besar, sedang dan kecil), kategori Kota (Besar Sedang dan Kecil), selain untuk kepala Daerah diberikan juga penghargaan untuk DPRD untuk urusan Legislasi dan Anggaran.

Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah yang diberikan kepada Pimpinan Daerah baik eksekutif maupun legislatif, yang berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan menuju green economy. Proses Penilaian Green Leadership adalah Penyusunan Dokumen Informasi Penilaian Kinerja Lingkungan Hidup Daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kota dan Kabupaten yang dikumpulkan pada tanggal 31 Agustus 2022 yang kemudian di nilai dengan tahapan sebagai berikut : penilaian kelengkapan tabel yang jumlahnya sebanyak 61 Tabel yang dilakukan oleh Pusdatin KLHK, kemudian Penilaian Analisis DPSIR yang dilaksanakan oleh Tim panelis Nirwasita Tantra, yang ditunjuk oleh Menteri LHK, dan Proses Penilaian Video pendek yang dikumpulkan oleh daerah serta verifikasi lapangan. Kategori penilaian nirwasita adalah yang terdiri dari Kategori Kepala Daerah yang meliputi kategori Propinsi, kategori kabupaten (Besar, sedang dan kecil), kategori Kota (Besar Sedang dan Kecil), selain untuk kepala Daerah diberikan juga penghargaan untuk DPRD untuk urusan Legislasi dan Anggaran.





PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN
NIRWASITA TANTRA 2021

G20
INDONESIA
2022

KEMENTERIAN
KESEHATAN
DAN KEBIDUKAN



3. Pengelolaan dan Pengembangan Website menlhk.go.id

Sejak tahun 2015 Pusat Data dan Informasi telah membangun dan mengelola website resmi KLHK, diawal pembangunan Pusat Data dan Informasi melakukan sinkronisasi subdomain pada setiap unit Eselon 1 lingkup KLHK. Mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Komite Informasi dan Penyiaran Publik (KIPP), di tahun 2020 hingga sekarang Pusat Data dan Informasi telah melakukan pengembangan dan penyesuaian terhadap halaman website KLHK.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Pusdatin secara rutin melakukan update data dan informasi pada halaman website KLHK, melakukan layanan hosting, layanan permohonan subdomain dan e-mail resmi KLHK.

Berdasarkan data monitoring yang diperoleh, pada kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 jumlah kunjungan website KLHK selama tahun 2022 adalah sejumlah 1.288.049 pengunjung. Jumlah tersebut melampaui target pada rencana kinerja Pusdatin yaitu sebanyak 100.000 pengunjung/tahun.

Pada tahun 2022 pun website KLHK berhasil mengunggah data/informasi berjumlah 452 yang terdiri dari siaran pers, publikasi, pengumuman, renstra, dan progres kinerja. Website KLHK di tahun yang akan mendatang diharapkan dapat menjadi pusat dari semua data dan informasi KLHK. Semua data dan informasi KLHK masuk dan keluar melalui satu pintu yaitu website KLHK. Tentu ini adalah tujuan bersama untuk tahun yang akan datang.



Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan meliputi:

Jumlah pengunjung website melebihi target Rencana Kinerja

Jumlah pengunjung website melampaui target pada Rencana Kinerja Pusdatin yaitu sebanyak 100.000 pengunjung/tahun dan meningkat sebesar 50% dari jumlah pengunjung pada tahun 2020 (1.288.049 pengunjung dalam setahun, Januari s/d Desember 2022)

Jumlah unggahan data/informasi pada website

Pada tahun 2022 website KLHK berhasil mengunggah data/informasi berjumlah 452 yang terdiri dari Siaran Pers, Publikasi, Pengumuman, Renstra dan Progress Kinerja.

Pengembangan UI/UX Website KLHK

Pengembangan UI/UX pada Website KLHK sangat dibutuhkan guna menunjang pengalaman pengguna website KLHK dalam mencari data/informasi agar lebih mudah, interaktif dan dinamis. UI/UX pada website KLHK telah berhasil dikembangkan dalam jangka waktu tiga bulan melalui kerjasama dengan seluruh pengelola website eselon 1 di KLHK.

Launching menu Eco Khotbah

Eco Khotbah adalah salah satu program Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengaitkan lingkungan dan alam dengan agama dan doa serta praktek. Dalam hal ini, Eco Khotbah adalah salah satu menu yang ada pada website KLHK, berisi pidato lingkungan dari ke-lima agama yang ada di Indonesia dan dapat diakses serta digunakan oleh masyarakat Indonesia.

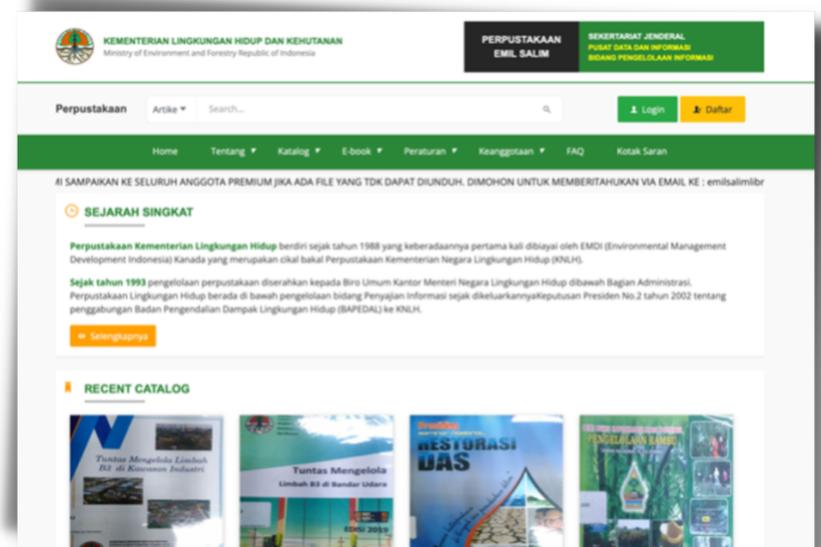
4. Pengelolaan Perpustakaan Emil Salim

Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup berdiri sejak tahun 1988 yang keberadaannya pertama kali dibiayai oleh EMDI (Environmental Management Development Indonesia) Kanada yang merupakan cikal bakal Perpustakaan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH).

Perpustakaan Emil Salim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbuka untuk umum (pelajar, mahasiswa, peneliti, masyarakat pemerhati lingkungan) sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang ada di perpustakaan. Dalam rangka penyebarluasan informasi lingkungan hidup dan kehutanan Perpustakaan Emil Salim memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi anggota perpustakaan.

Untuk menunjang literasi dan jangkauan pengguna Perpustakaan Emil Salim lebih luas, perpustakaan ini menambah website perpustakaan.menlhk.go.id yang diharapkan untuk mempermudah pengguna.

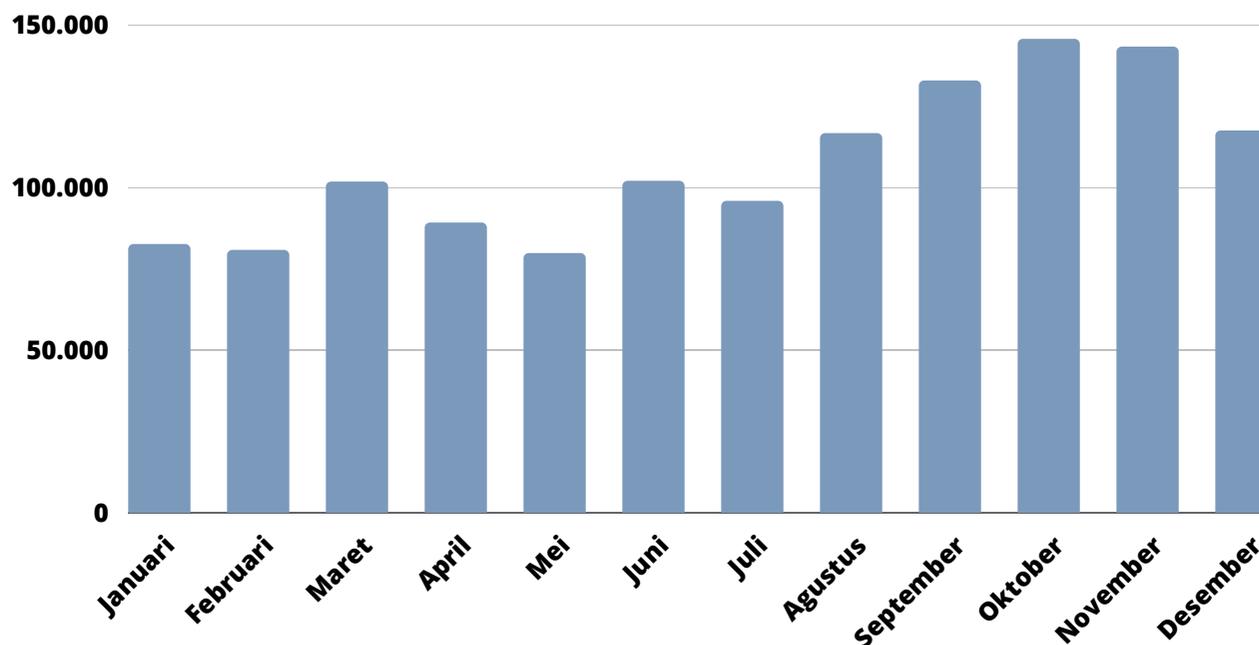
Perpustakaan Emil Salim berupaya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud yang mencakup kegiatan : pengadaan bahan perpustakaan, pengembangan website perpustakaan, keikutsertaan Perpustakaan dalam Pameran LHK, pembinaan perpustakaan di Pusat Pengelolaan Ekoregion, Updating informasi pada website perpustakaan dan penyediaan sarana untuk memperlancar tugas perpustakaan



C. Jumlah Pengunjung Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah pengunjung website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu indikator kinerja kegiatan, berdasarkan data monitoring yang diperoleh pada kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2022. Pusat Data dan Informasi mengunggah sebanyak 452 data dan informasi pada website KLHK selama tahun 2022 dengan jumlah pengunjung sebanyak 1.288.049 pengunjung. Berikut jumlah pengunjung yang dijabarkan dalam kurun waktu per bulan :

Bulan	Jumlah Pengunjung
Januari	82.598
Februari	80.782
Maret	101.791
April	89.194
Mei	79.803
Juni	102.025
Juli	95.862
Agustus	116.693
September	132.862
Oktober	145.668
November	143.281
Desember	117.490



D. Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Sistem Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nilai tingkat kepuasan layanan data dan sistem informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan satker Pusat Data dan Informasi diperoleh melalui survey secara online yang bersifat pilihan dan tidak memaksa pengguna. survey ini diikuti oleh 231 responden yang merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan masyarakat umum. Setelah survey terisi, diperoleh nilai indeks sebesar 4,17 atau setara dengan 104,18% (Sangat Baik) yang sudah mencapai target kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, nilai indeks tahun 2022 telah meningkat sebesar 22,87%.

No	Unsur Pelayanan	Nilai %	Keterangan
A	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi		
1.	Profesionalitas layanan SDM	82,84 %	Sangat Baik
2.	Tingkat respon pegawai	83,19%	Sangat Baik
3.	Kemudahan melakukan koordinasi	82,41%	Sangat Baik
4.	Tingkat kualitas metode/sarana prasarana dalam koordinasi	81,21%	Sangat Baik
5.	Kemudahan layanan	83,97%	Sangat Baik
B	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi		
1.	Profesionalitas layanan SDM	83,79%	Sangat Baik
2.	Tingkat respon pegawai	82,93%	Sangat Baik
3.	Kemudahan melakukan koordinasi	82,59%	Sangat Baik
4.	Tingkat kualitas metode/sarana prasarana dalam koordinasi	82,41%	Sangat Baik
5.	Kemudahan layanan	83,71%	Sangat Baik
C	Sub Bagian Tata Usaha		
1.	Profesionalitas layanan SDM	83,45%	Sangat Baik
2.	Tingkat respon pegawai	83,28%	Sangat Baik
3.	Kemudahan melakukan koordinasi	83,45%	Sangat Baik
4.	Tingkat kualitas metode/sarana prasarana dalam koordinasi	82,93%	Sangat Baik
5.	Kemudahan layanan	82,59%	Sangat Baik

Pengumpulan data/informasi survei kepuasan ke beberapa daerah meliputi Jawa Barat, DI Yogyakarta, Riau, Sumatra Utara dan Jawa Tengah mengenai layanan pada Pusat Data dan Informasi dengan metode kuantitatif mengacu pada Indeks Kepuasan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB)

E. Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Berdasarkan referensi terkini, istilah e-Government sebelumnya mulai digantikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau (SPBE) yang diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Seiring dengan telah dirilisnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan dirilisnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi dasar urgensi perlunya implementasi SPBE yang memadai.

Salah satu indikator SPBE adalah perlunya kebijakan internal yang berisi strategi pemerintahan berbasis elektronik, rancang bangun proses, sistem dan infrastrukturnya, beserta rencana implementasinya, sebagai referensi pembangunan TIK di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kurun waktu tahun 2021-2025. Berkenaan dengan hal tersebut di atas melalui pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPBE ditahun 2022 telah dihasilkan beberapa keluaran sebagai berikut :

1. Blueprint SPBE yang didalamnya mencakup peta rencana, aritektur, tata kelola dan manajemen SPBE.
2. Keputusan Menteri Nomor. 694/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022 tentang penyelenggaraan SPBE Lingkup KemenLHK
3. SK Sekjen Nomor 71/SETJEN/ROKUM/KUM.1/10/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekjen KemenLHK Nomor SK. 43/SETJEN/ROKUM/DTN.2/7/2022 tentang Tim Koordinasi SPBE lingkup KLHK



F. Pengelolaan Sistem, Jaringan dan Keamanan Teknologi Informasi

Sesuai tupoksi yang dimandatkan, Pusat Data dan Informasi memiliki peran vital guna menjamin stabilitas, keamanan teknologi informasi dan komunikasi yang dipergunakan oleh seluruh level unit kerja. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi dalam mendukung mandat tersebut yaitu :

1. Pengelolaan Sistem Data dalam

Aplikasi data alam merupakan aplikasi pengembangan dari kegiatan DIKPLHD, yang bertujuan untuk mempermudah daerah untuk mengisi dokumen IKPLHD. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah harus mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup dan kehutanan daerah (SILHKD) dalam mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Juga disebutkan bahwa sistem informasi lingkungan paling sedikit memuat informasi yang salah satunya adalah status lingkungan hidup dan kehutanan

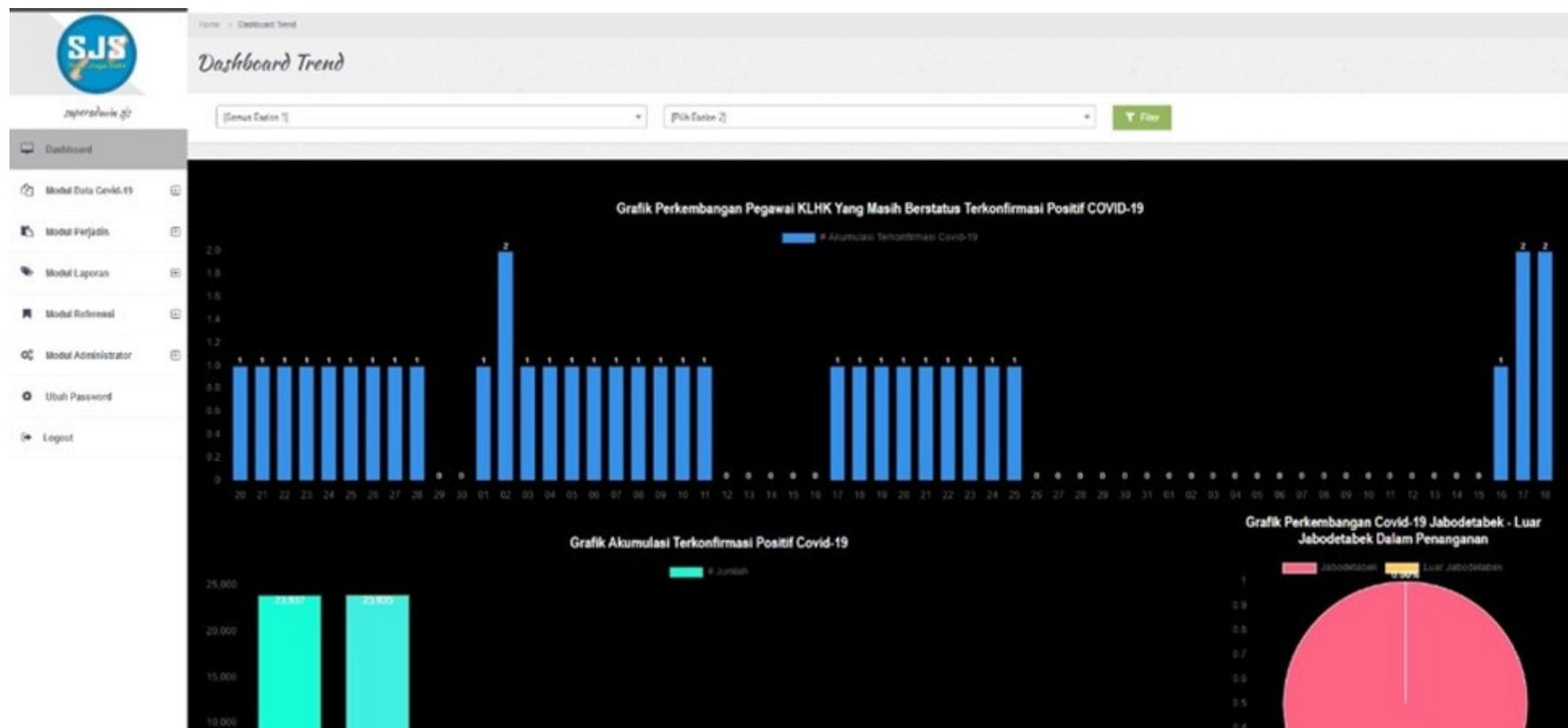
Aplikasi data alam merupakan aplikasi pengembangan dari kegiatan DIKPLHD, yang bertujuan untuk mempermudah daerah untuk mengisi dokumen IKPLHD. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah harus mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup dan kehutanan daerah (SILHKD) dalam mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Juga disebutkan bahwa sistem informasi lingkungan paling sedikit memuat informasi yang salah satunya adalah status lingkungan hidup dan kehutanan



2. Pengelolaan Sistem satujagasatu

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan dan perubahan kinerja ASN di awal tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021 ini yang diyakini masih akan berlanjut khususnya di lingkungan kerja KLHK. Merespon kondisi pandemi, kementerian LHK telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar kinerja tetap terjaga serta menekan angka penyebaran infeksi virus corona. Dengan mencermati perkembangan penyebaran covid-19 yang semakin meluas yang salah satunya berdampak kepada ASN khususnya di lingkup KLHK, maka perlu dilakukan pendataan riwayat kesehatan ASN terdampak covid-19 secara digital sehingga mempermudah pengambilan kebijakan yang tepat dalam rangka pemenuhan hak-hak ASN terdampak.

Diharapkan dengan terlaksananya pembuatan sistem pendataan riwayat kesehatan ASN terdampak covid-19 yang diberi nama Aplikasi Satu Jaga Satu ini akan lebih mendukung terciptanya perencanaan dan pelaksanaan sistem kinerja ASN yang optimal di era pandemi saat ini sehingga lebih maksimal dan efisien khususnya di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

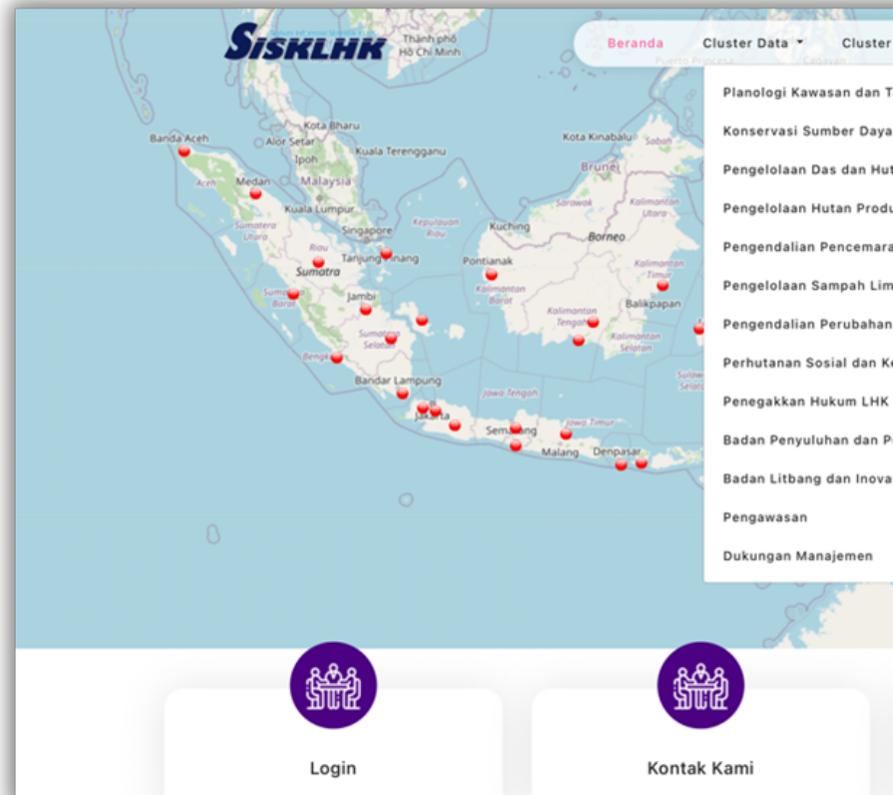


3. Pengelolaan Sistem SISLHK dan Satu Data

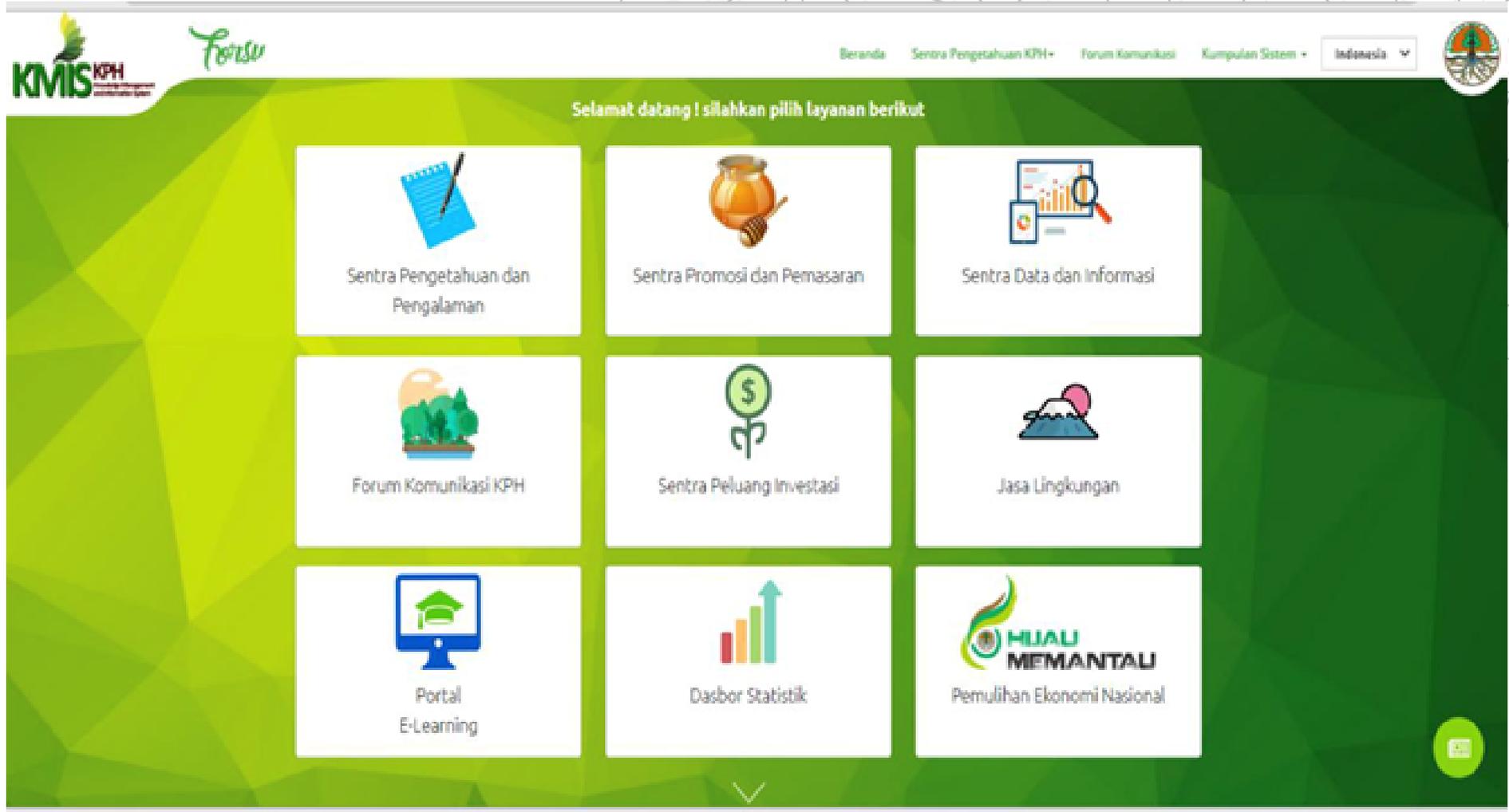
Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (12 Juni 2019) yang meluncurkan sebuah peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tentang Satu Data Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap dapat mewujudkan arahan tersebut dengan sebaik baiknya, sehingga nantinya akan dapat menjadi faktor pendukung utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rferensi dan Data Induk. Berdasarkan PerPres RI No 39 Tentang Satu Data Indonesia pasal 2, pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pembangunan.

Ruang lingkup Pekerjaan Pengembangan Aplikasi Satu Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

- Terbentuknya tampilan aplikasi yang berdasarkan standar data sesuai dengan PerPres No. 39 Tentang Satu Data.
- Termonitornya ketersediaan data yang di golongan secara sistematis berdasarkan kriteria yang di tetapkan
- Dapat dengan mudah dan cepat mencari serta menemukan data yang diminta.
- Data yang di hasilkan dilengkapi dengan MetaData yang mengikuti struktur dan format yang baku yang telah di tetapkan oleh pembina data tingkat pusat.
- Hasil Data tersimpan secara konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian dan semantik/ artikulasi keterbacaan dan dalam bentuk format terbuka yang dapat di baca secara elektronik.
- Menampilkan kode referensi/ atau data induk yang di bahas dalam forum Satu Data Tingkat Pusat.
- Memunculkan Walidata yang di golongan berdasarkan kode referensi dan/ atau data induk.



G. Pelaksanaan Forest Investment Program (FIP-II)



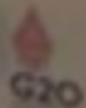
Kegiatan FIP-2 di Pusat Data dan Informasi KLHK berupa pembangunan dan operasional KMIS. Pengembangan Platform Pengetahuan KPH terdiri atas Pembangunan Sistem Pengelolaan Pengetahuan dan Informasi (KMIS) KPH, dan Pengembangan Kapasitas dan Pertukaran Pengetahuan. Secara umum KMIS KPH dirancang untuk menjadi beberapa sub-portal yang satu sama lain saling melengkapi informasi mengenai pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi 10 KPH khususnya dan 600 KPH pada umumnya.

KMIS KPH juga disiapkan sebagai sumber data dan informasi mengenai pengelolaan hutan pada KPH mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Adapun jenis data dan informasi yang dikelola memiliki format digital, baik yang diperoleh melalui pengumpulan data secara langsung ataupun dari proses digitalisasi yang berasal dari format non digital. Alamat Aplikasi KMIS adalah <https://kmisfip2.menlhk.go.id/>.

Selain Portal KMIS, Pusdatin juga membangun dan mengelola Website FIP Proyek II. Website ini dapat memberikan informasi mengenai profil dan kegiatan seluruh proyek baik Komponen 1, Komponen 2, Komponen 3, maupun Komponen 4, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan keproyekan, termasuk informasi mengenai mekanisme pengamanan proyek (social safeguard, environment safeguard, dan grievance redress mechanism), pengembangan pola komunikasi, serta diharapkan menjadi media interaktif antara proyek dan audience.

Sumber data dan informasi disiapkan oleh PMU dan konsultan berkordinasi dengan IA dan penanggung jawab kegiatan. Sistematika Website yang disusun terintegrasi dengan KMIS KPH, dan terkoneksi dengan Website Kementerian LHK dan World Bank. Website tersebut dapat mempublikasi format data numerik, info gafis, gambar, dan video.

The screenshot displays the website for the Forest Investment Program (FIP) Project II. The header includes the logo for 'PROGRAM INVESTASI KEHUTANAN PROYEK-II' and the 'KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA'. The navigation menu contains links for Beranda, Profil, KPH, KMIS, Buku Tamu, Dashboard Statistik, Dokumen, and Galeri. The main content area features a video player titled 'Kelompok Tani Hutan Publikasikan Produk Hasil Hutan Lewat Festival Forest Investment Program 2022'. To the right, the 'Posting Terbaru' section lists several news items, including 'Festival FIP, KLHK Dorong Kesadaran Masyarakat Soal Betapa Bernilainya Hutan Indonesia', 'Kelompok Tani Hutan Publikasikan Produk Hasil Hutan Lewat Festival Forest Investment Program 2022', 'Menilik KTH Bina Sejahtera Binaan KPH TBS Riau', and 'Mengapa TBS Menjadi Pilot Project Folu Net Sink 2030'. A 'Rekomendasi' section is located at the bottom left, and a WhatsApp icon for 'Pengaduan GRM' is at the bottom right.



KPH KAPUAS HULU UTARA, KALBAR



Let's get some info
just up
there guys!

api aja
in deg-degan
PALADI
AIA



STRANAS PK



STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2021-2022 mempunyai 2 Fokus yaitu Perizinan dan Tata Niaga dan Keuangan Negara, serta 4 Aksi yaitu Pemanfaatan dan Beneficial Ownership (BO), Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta, Implementasi E-payment dan E-katalog, dan Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembinaan PNPB dan Pendapatan Lainnya

Total capaian Stranas PK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Bulan Keduabelas (B.12) Tahun 2021 memperoleh nilai kepatuhan pengisian logframe 100% yang diperoleh dari Portal jaga.id yang merupakan portal berbagi data yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengukur dan melihat progress aksi stranas pada masing-masing Kementerian/Lembaga.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	182	029	465005	KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Nilai	100.00	52.33	88.93	76.19	100.00	87.06	100.00	99.92	89.32	100%	89.32
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.23	17.79	7.62	10.00	8.71	5.00	24.98			
					Nilai Aspek	76.17		90.44					99.92			

Disclaimer:

Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

H. Realisasi Anggaran



Total pagu anggaran (RM dan HLN) pada Pusat Data dan Informasi Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 20.262.184.000.-. Terdiri dari sumber pagu RM sebesar Rp. 16.115.241.000,- (79,53%) dan pagu Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 4.146.942.000,- (20,47%).

Berdasarkan data OMSPAN, **realisasi anggaran tahun 2022 Pusat Data dan Informasi sebesar Rp. 20.246.287.801,- atau 99,92%**, dimana realisasi yang bersumber dari RM sebesar Rp. 16.104.561.550,- (99,93%) dan realisasi yang bersumber dari HLN sebesar Rp. 4.141.726.251,- (99,87%).

Berdasarkan pada capaian kinerja Pusat Data dan Informasi (100%) maka realisasi pelaksanaan anggaran (99.92%). Hal tersebut menunjukkan penggunaan anggaran Pusat Data dan Informasi sangat efisien terhadap capaian kinerja.

CAPAIAN KINERJA

3_{/3}

Data dan Informasi KLHK

4.17_{/4}

Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Informasi KLHK

Pusat Data dan Informasi
Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi kementerian

3,81^{*}_{/3,5}

SPBE

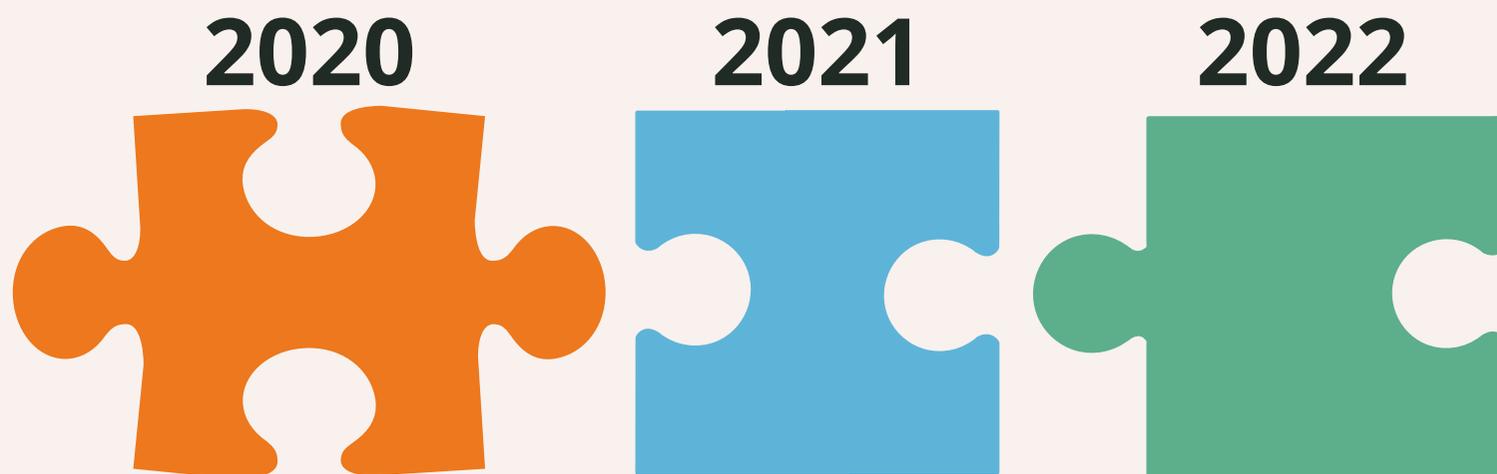
1.288.049_{/100.000}

Jumlah Pengunjung WEB KLHK



* angka diperoleh dari perhitungan mandiri

INFOGRAFIS PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PUSDATIN TA 2020,2021,2022



	2020		2021		2022	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Data dan Informasi KLHK	4	4	3	3	3	3
Tingkat Kepuasan Layanan Data	4	4	4	4	4	4,17
Nilai SPBE	3,5	3,5	3,55	2,62	3,6	3,81*
Jumlah Pengunjung web KLHK	100.000	100.000	100.000	999.724	100.000	1.288.049

* angka diperoleh dari perhitungan mandiri

PERJANJIAN KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. EDI SULISTYO H. SUSETYO, S.Hut., M.Si.

Jabatan : KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M

Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dengan sebenar-benarnya yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggungjawab jabatan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M
NIP. 19640930 198903 1 001

Dr. EDI SULISTYO H. SUSETYO, S.Hut., M.Si.
NIP. 19701206 200003 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 REVISI
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

Kegiatan <i>(1)</i>	Sasaran Kegiatan <i>(2)</i>	Indikator Kegiatan <i>(3)</i>	Target <i>(4)</i>	Satuan <i>(5)</i>
5368-Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK	01-Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi Kementerian	01-Data dan Informasi KLHK (Statistik, SLHI, Status Hutan)	3	Dokumen
		02-Tingkat kepuasan layanan data dan Sistem Informasi KLHK	4	point
		03-Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,6	Point
		04-Jumlah pengunjung WEB KLHK	100000	Pengunjung

Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)

EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	001-Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	4.351.886
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	001-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.700.000
FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi KLHK dan Command Center	1	Sistem Informasi	8.680.563
FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Forest Investment II	1	Layanan	4.146.942
EBB-Layanan Sarana Prasarana Internal	001-Layanan Sarana Internal	12	Layanan	696.992

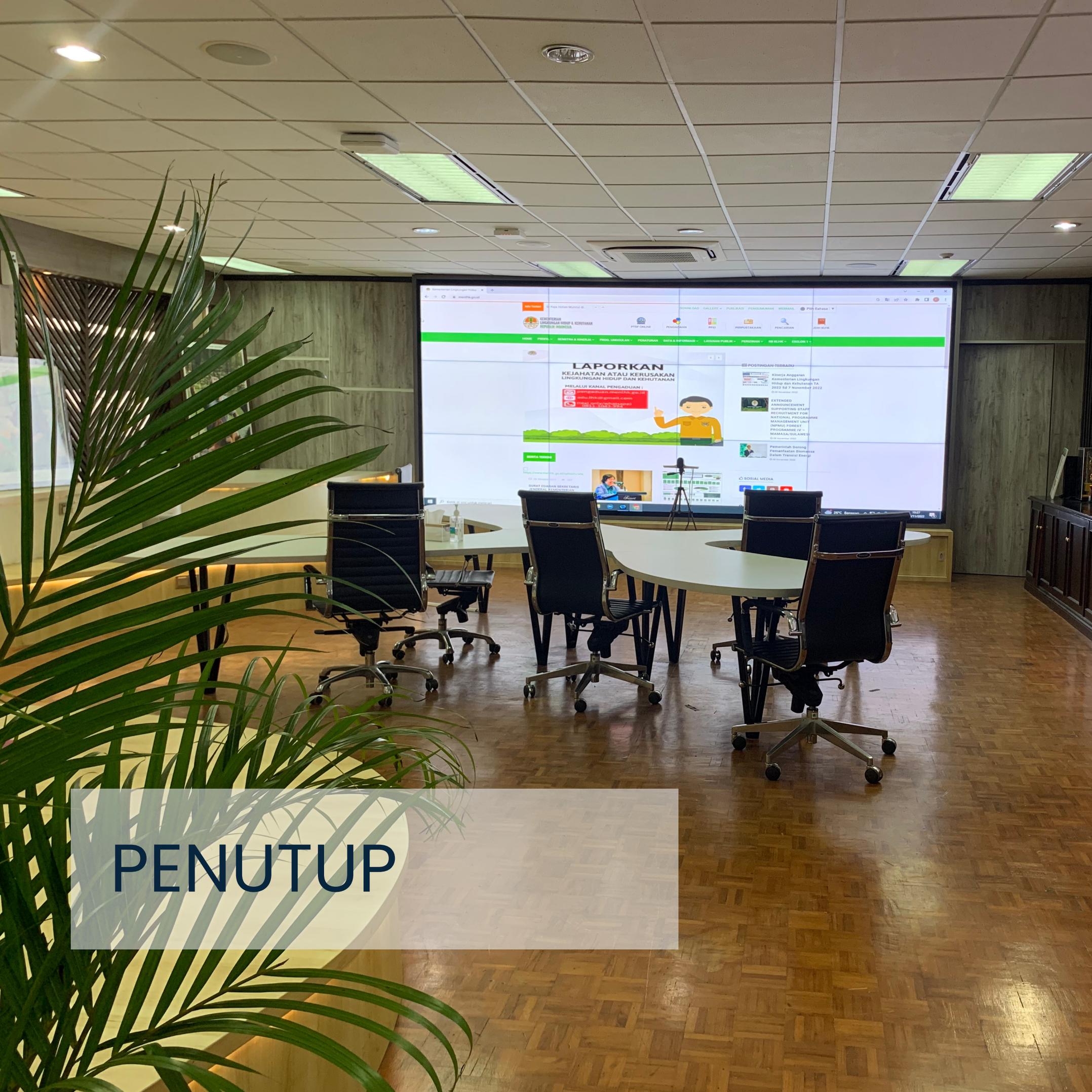
Sekretaris Jenderal

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M
NIP. 19640930 198903 1 001

Jakarta, Desember 2022

Kepala Pusat Data dan Informasi

Dr. EDI SULISTYO H. SUSETYO, S.Hut., M.Si
NIP. 19701206 200003 1 004



PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran indikator-indikator kinerja Pusat Data dan Informasi, masing-masing indikator kinerja dapat tercapai 100%, yaitu Data dan Informasi KLHK (IKLH, SLHI, Statistik, SLHI), Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Sistem Informasi KLHK, Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Jumlah Pengunjung Website KLHK.

Dari aspek pelaksanaan anggaran, realisasi anggaran Pusat data dan informasi tahun 2021 adalah sebesar 99,31%. Apabila dibandingkan antara capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja Pusat data dan informasi maka terdapat rasio 0,99 yang berarti penggunaan anggaran pada Pusat data dan informasi sangat efisien terhadap capaian kerjanya.

Upaya-upaya yang perlu ditingkatkan kedepan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan data dan informasi adalah :

- Meningkatkan sosialisasi, asistensi dan fasilitasi kepada daerah untuk lebih aktif dalam memanfaatkan aplikasi SILHKD/Data Alam untuk penyusunan dokumen IKPLHD.
- Meningkatkan sosialisasi dan asistensi kepada satuan kerja lingkup KLHK mengenai layanan teknologi informasi baik infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi dan keamanan informasi.
- Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan dan peningkatan bandwidth internet KLHK.
- Meningkatkan layanan data, informasi, perpustakaan, dan museum lingkup KLHK.
- Meningkatkan layanan penyediaan akun mail.menlhk.go.id kepada para ASN lingkup Kementerian LHK